

PROFIL DATA GENDER PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2019



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SAWAHLUNTO



KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO

SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana. Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak ini merupakan perwujudan komitmen Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dan OPD terkait sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2019 ini adalah sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Kota Sawahlunto.

Data Terpilah Gender dan Anak merupakan sumber inspirasi yang lebih akurat dalam kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsif gender untuk mengakselerasi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai lanjutan dari MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015.

Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2019 disusun atas kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dengan OPD terkait yang ada di Kota Sawahlunto. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang terlibat dalam penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak ini, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi Data Terpilah Gender dan Anak yang akan datang.

Semoga segala upaya yang kita lakukan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pemanfaatan data gender dan anak mendapat ridho Allah SWT.

Sawahlunto, Februari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAWAHLUNTO**

DEDI SYAHENDRI, S.STP, M.Si
NIP.19780711 199810 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, Buku Data Perspektif Gender Kota Sawahlunto Tahun 2019 telah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto dengan Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto dan OPD terkait di Kota Sawahlunto.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah belum terpecahkan karena kurangnya ketersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum dapat diwujudkan secara optimal. Dengan adanya buku ini diharapkan OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambil kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Dalam penyusunan Buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini.
2. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dari OPD terkait yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Dan kepada semua pihak yang telah berupaya untuk menyelesaikan buku ini.

Semoga semua sumbangan moril dan materil yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat imbalan berlipat ganda. Kami menyadari buku ini sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Sawahlunto, Februari 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAWAHLUNTO**

DEDI SYAHENDRI, S.STP, M.Si
NIP.19780711 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
B. Tujuan Publikasi Data Terpilah.....	
C. Sumber Data	

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

A. Kondisi Geografis	
B. Sosial Budaya	
C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
E. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
F. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan	

III. DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN

A. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin	
B. Jumlah Penduduk menurut Dokumen Kependudukan.....	
C. Keluarga Berencana	
D. Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin	
E. Anak yang memiliki Akte Kelahiran menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019	

IV. DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG PENDIDIKAN

A. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	
B. Rata-rata Lama Sekolah	
C. APS, APM, APK	
D. Angka Buta Huruf	
E. Putus Sekolah	

V. DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KESEHATAN

A. Pendahuluan	
B. Pelayanan Kesehatan Ibu	
C. Pelayanan Kesehatan Anak	

VI. DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG EKONOMI DAN TENAGA KERJA

A. Penduduk dan Kegiatan Utama	
B. Partisipasi Perempuan dalam Koperasi	
C. Kiprah perempuan dalam Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).....	

- D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- E. Pengangguran

VII. BIDANG HUKUM, SOSIAL, BUDAYA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

- A. Bidang Hukum
- B. Bidang Sosial Budaya
- C. Kekerasan terhadap Perempuan

VIII. PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

- A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
- B. Peranan dan Komposisi di Lembaga Yudikatif
- C. Peranan dan Komposisi di Lembaga Eksekutif
- D. Dasar Hukum dan Arah Kebijakan Pemberdayaan di Kota Sawahlunto

DAFTAR TABEL

Tabel

1	Desa dan Kelurahan di Kota Sawahlunto
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2018
3	Data Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Jenis Kelamin
4	Jumlah penduduk yang memiliki KTP menurut jenis kelamin
5	Jumlah keluarga yang memiliki KK menurut jenis kelamin
6	Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran menurut jenis kelamin
7	Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kematian menurut jenis kelamin
8	Jumlah penduduk yang memiliki Akte Perkawinan menurut jenis kelamin
9	Jumlah penduduk yang memiliki Akte Cerai menurut jenis kelamin
10	Data penduduk Migrasi (Masuk Keluar) menurut Jneis kelamin
11	Jumlah Peserta KB Baru (PB) per Kecamatan di Kota Sawahlunto
12	Jumlah Peserta KB Aktif (PA) per Kecamatan di Kota Sawahlunto
13	Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) per Kecamatan
14	Jumlah Kepala Keluarga menurut jenis kelamin per kecamatan
15	Jumlah anak (umur <18 th) yang memilki Akte Kelahiran
16	Data Penduduk Kota Sawahlunto menurut pendidikan ditamatkan
17	Rata-rata lama sekolah
18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok Umur
19	Angka partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan
20	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut kelompok Umur
21	Data jumlah penduduk 15 th ke atas menurut kelompok umur & kemampuan baca tulis

22	Cakupan angka kematian Ibu Maternal per Kecamatan
23	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan per Kecamatan
24	Cakupan Ibu bersalin/nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan & Vit A
25	Cakupan kunjungan ibu hamil K1 & K4 per Kecamatan & Puskesmas
26	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe1 dan Fe3
27	Persentase cakupan imuisasi TD pada ibu hamil per Kecamatan & Puskemas
28	Jumlah kematian bayi (AKB) dan BALITA (AKABA)
29	Cakupan bayi ASI Eksklusif di Kota Sawahlunto Tahun 2019
30	Cakupan penderitaan HIV?AIDS berdasarkan Kelompok Umur
31	Jumlah posyandu menurut strata per Kecamatan
32	Data Jenis Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin
33	Partisipasi perempuan sebagai anggota koperasi menurut jenis koperasi
34	Partisipasi perempuan sebagai anggota koperasi per Kecamatan
35	Partisipasi perempuan sebagai pengurus koperasi menurut jenis koperasi
36	Partisipasi perempuan sebagai pengurus koperasi per Kecamatan
37	Kiprah perempuan dalam pengelolaan sentra industry kecil menengah
38	Jumlah UMKM menurut jenis kelamin
39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
40	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
41	Jumlah & Jenis Lapas
42	Jumlah penghuni Lapas menurut jenis kelamin

43	Jumlah penghuni Lapas menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan
44	Jumlah penghuni lapas menurut kelompok umur
45	Jumlah penghuni lapas menurut kasus
46	Peraturan & Kebijakan Daerah yang responsif gender
47	Jumlah anak terlantar menurut jenis kelamin
48	Jumlah anak yang ditampung di panti asuhan dan non panti
49	Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK)
50	Jumlah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
51	Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi
52	Jumlah penduduk Lansia terlantar
53	Jumlah pendampingan sosial program keluarga harapan (PKH)
54	Jumlah putusan cerai
55	Jumlah kelembagaan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
56	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut kelompok umur
57	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan
58	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan
59	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan
60	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
61	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
62	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis pelayanan
63	Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan

64	Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan
65	Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut hubungan dengan korban ..
66	Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut kebangsaan
67	Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin & jenis kekerasan ...
68	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian
69	Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis pelayanan
70	Jumlah anak korban kekerasan menurut hubungan dengan pelaku
71	Jumlah anggota DPRD menurut partai & jenis kelamin
72	Jumlah anggota DPRD menurut komisi & jenis kelamin
73	Jumlah anggota DPRD menurut Fraksi & jenis kelamin
74	Jumlah hakim menurut jenis kepangkatan & jenis kelamin
75	Jumlah PNS menurut jenis jabatan & jenis kelamin
76	Jumlah tim badan pertimbangan jabatan & kepangkatan (Baperjakat)
77	Camat menurut jenis kelamin

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Persentase Luas Wilayah di Kota Sawahlunto	7
2	Tinggi Ibu Kecamatan Dari Permukaan Laut	8
3	Luas Tanah Menurut Penggunaan Tanah di Kota Sawahlunto	9
4	Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2015	13
5	Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017	14
6	Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2017	15
7	Jumlah peserta KB Baru berdasarkan jenis kontrasepsi	16
8	Jumlah peserta KB Aktif (PA) per Kecamatan	44
9	Persentase Penduduk 15+ Menurut jenis kegiatan utama	58

PENDAHULUAN¹

A. Latar Belakang

Terbatasnya ketersediaan data gender menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender. IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Agenda pembangunan pasca era Millenium Development Goals (MDG's) adalah SDGs (Sustainable Goals) dimana isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Permasalahan ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginyatindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi di masa mendatang.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai

bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

B. Tujuan Publikasi Data Terpilah

Publikasi statistik ini disusun untuk melihat perkembangan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 dan 2019 serta memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Penyusunan Statistik Gender merupakan bagian dari konsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) untuk membangun landasan pembangunan yang kuat agar pembangunan dapat terwujud dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Penyusunan statistik gender Kota Sawahlunto ini dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berperspektif gender, dan fakta terkait kondisi anak di Kota Sawahlunto. Statistik gender diperlukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perempuan dan laki-laki pada bidang-bidang utama, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana. Statistik gender juga diharapkan mampu menggambarkan keunikan isu-isu gender maupun isu-isu perlindungan anak yang khas di Kota Sawahlunto. Statistik gender Kota Sawahlunto ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender.
2. Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kota Sawahlunto.
3. Sebagai bahan untuk mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui PPRG.

C. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2019 adalah data sekunder yang dihimpun dari OPD dan pihak terkait di Kota Sawahlunto.

2 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

A. Kondisi Geografis

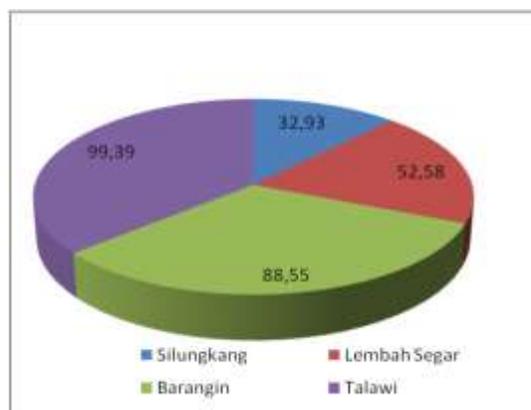
Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lembah Segar. Secara Astronomis Kota Sawahlunto terletak antara $0^{\circ} 33' 40''$ – $0^{\circ} 48' 33''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 41' 59''$ – $100^{\circ} 49' 60''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 27.345 Ha atau sekitar 0,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Jarak dari Kota Sawahlunto ke kota Padang (ibukota propinsi) adalah 95 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu sekitar 2 jam dengan kendaraan roda empat.

Secara administratif, Kota Sawahlunto terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan, dan 27 desa. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan paling luas yakni 99,39 Km², diikuti oleh Kecamatan Barangin dengan Luas 88,55 Km, Lembah Segar dengan luas 52,58 Km² serta Kecamatan Silungkang merupakan kecamatan dengan luas paling kecil, yakni 32,93 Km².

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan dan barat : berbatasan dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung

Luas wilayah Kota Sawahlunto jika digambarkan seperti berikut.

Gambar 1. Persentase Luas Wilayah di Kota Sawahlunto 2019



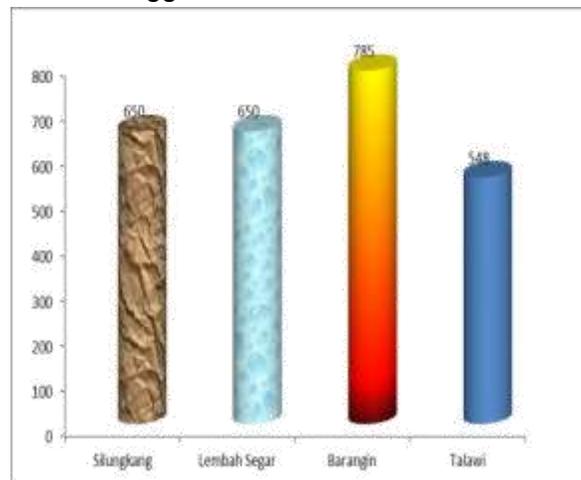
Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2019

Kota ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 'kota lama' dan 'kota baru' yang terakhir merupakan pemekaran dari 'kota lama'. 'Kota lama' terletak di Kecamatan Lembah Segar dan memiliki luas 52,58 Km², yang mulai terbentuk ketika area tambang batu bara dibuka pada akhir abad ke-19. Daerah ini juga dikenal sebagai pusat administrasi wilayah kota keseluruhan. Adapun batas 'kota lama' adalah:

Nagari Kolok (Kecamatan Barangin) dan Sijantang (Kecamatan Talawi) di sebelah utara, Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar) di sebelah timur dan barat, Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar), dan Nagari Silungkang (Kecamatan Silungkang) di sebelah selatan.

Kota Sawahlunto terletak di antara jajaran Bukit Barisan dengan ketinggian antara 250-650 m dpl., Kota Sawahlunto memiliki bentang alam yang bervariasi, terdiri dari perbukitan terjal, landai, dan dataran. Kota lama seluas 5,8 km terletak di sebuah plato sempit yang dikelilingi perbukitan terjal, menjadikan daerah sekelilingnya sebagai pembatas dalam pengembangan tata wilayah kota ini. Sedangkan kawasan datar yang relatif lebar terdapat di Kecamatan Talawi, yang terbentang dari utara ke selatan, sementara di bagian utara yang bergelombang dan relatif datar, kawasan berpenduduk lebih banyak berada di kawasan dengan ketinggian 100–500 m dpl. Untuk kawasan yang terletak pada bagian timur dan selatan, topografi wilayahnya relatif curam (dengan kemiringan lebih dari 40%). Data ketinggian daerah di Kota sawahlunto dapat digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 2. Tinggi Ibu Kecamatan dari Permukaan Laut



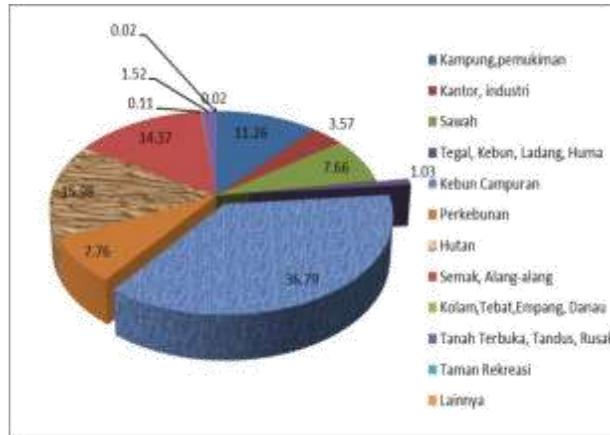
Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2019

Morfologi atau bentang alam Kota Sawahlunto dan sekitarnya dapat dikelompokkan menjadi perbukitan terjal, perbukitan landai, dan dataran. Perbukitan terjalnya berupa bukit membulat dengan lereng bukit curam hingga terjal. Kemiringan lereng terjal menjadi kendala sekaligus faktor pembatas bagi perkembangan wilayah ini. Perbukitan landai terletak hampir di tengah Kota Sawahlunto seperti kondisinya saat ini, tetapi umumnya berupa jalur-jalur sempit yang dapat dikembangkan menjadi suatu permukiman perkotaan.

Kawasan dengan kemiringan lereng antara 0% hingga 15%, yaitu kawasan di Kota Sawahlunto yang bisa dimanfaatkan dengan sedikit kesukaran teknis dan aman, hanya memiliki luas 5.183 hektar

atau 18,5% luas daerah, yang mana seluas 2.411 hektar berada di Talawi. Adapun data luas penggunaan tanah di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Luas Tanah Menurut Penggunaan Tanah di Kota Sawahlunto



Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2019

Luas Kota Sawahlunto adalah 27.345 hektar. Sebagian besar wilayah Kota Sawahlunto merupakan kebun campuran yaitu seluas 10.057 hektar. Hutan merupakan luas penggunaan lahan terbesar kedua di Kota Sawahlunto dengan luas lahan 4.322 hektar. Luas semak/alang-alang yaitu 3.909 hektar. Kampung/pemukiman 3.068 hektar. Sawah 2.094 hektar dan kantor/Industri seluas 975 hektar.

B. Sosial Budaya

Penduduk Kota Sawahlunto terdiri dari multi etnis, yaitu Suku Jawa, Suku Batak, Suku Minang, Cina, Ambon, dll. Secara administratif, Kota Sawahlunto memiliki 4 kecamatan, terdiri dari 27 desa dan 10 kelurahan. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Desa dan Kelurahan di Kota Sawahlunto

No	Kelurahan	Desa
1	Kel. Aur Mulyo	Desa Lunto Timur
2	Kel. Kubang Sirakuk Utara	Desa Lunto Barat
3	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	Desa Kubang Tengah
4	Kel. Pasar	Desa Kubang Utara Sikabu
5	Kel. Tanah Lapang	Desa Pasar Kubang
6	Kel. Air Dingin	Desa Santur
7	Kel. Saringan	Desa Kolok Mudik
8	Kel. Lubang Panjang	Desa Kolok Nan Tuo
9	Kel. Durian I	Desa Talago Gunung
10	Kel. Durian II	Desa Lumindai
11		Desa Balai Batu Sandaran
12		Desa Silungkang Duo
13		Desa Silungkang Oso
14		Desa Silungkang Tigo
15		Desa Muaro Kalaban
16		Desa Taratak Bancah
17		Desa Talawi Hilir
18		Desa Talawi Mudik
19		Desa Bukik Gadang
20		Desa Batu Tanjung
21		Desa Kumbayau
22		Desa Tumpuk Tengah
23		Desa Datar Mansiang
24		Desa Sijantang Koto
25		Desa Salak
26		Desa Sikalang
27		Desa Rantih

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

Dengan semakin mantapnya Undang-Undang Otonomi Daerah di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat, pemerintahan ditingkat Desa/Kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan terendah sudah berjalan dengan baik. Sampai akhir tahun 2019, dimana untuk Kota Sawahlunto terbentuk atas 4 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 27 Desa.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Sawahlunto sangat kental dengan filsafat adat Suku Minangkabau, sebagai suku mayoritas yang berbunyi, "Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah". Hal ini dapat dimaknai kalau Islam sebagai agama mayoritas sangat berperan dalam keseharian masyarakatnya.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sejak awal, pembangunan manusia sudah menjadi tujuan dalam model pembangunan di Indonesia, setidaknya dalam tataran normatif yang tercermin dalam falsafah Negara seperti Pancasila, UUD 1945, dan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya. Berbagai model untuk mengukur keberhasilan pembangunan telah banyak dikembangkan, diantaranya konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (economic growth), pembangunan sumber daya manusia (human resource development), kebutuhan dasar (basic needs), dan kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat output yang tinggi tetapi dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari perangkat kemiskinan tanpa memiliki pilihan-pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (agen pembangunan). Semua model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial/tunggal.

Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporannya "Global Human Development Report" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (Human Development)", sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.

Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (utilization) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan

pada pertumbuhan (economic growth), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia. Hal ini terkait konsep pembangunan manusia UNDP yang mengandung empat unsur yaitu: produktivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai suatu "model" pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk: a. tentang penduduk, berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, b. untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri, dan c. oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (empowerment) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan (UNDP, HDR 1990).

Menurut UNDP upaya ke arah "perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Perbandingan Antarprovinsi 1990-1993). Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 4 (empat) indikator yaitu: Angka Harapan Hidup (life expectancy at age 0: e_0), Angka Melek Huruf penduduk dewasa (adult literacy rate: AMH), Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling: MYS), dan Purchasing Power Parity (PPP).

Angka harapan hidup mengukur dimensi "umur panjang dan sehat", angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi "pengetahuan dan keterampilan", dan purchasing power parity mengukur dimensi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI (Human Development Index) yang diterjemahkan menjadi IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Penghitungan IPM UNDP digunakan untuk perbandingan kemajuan pembangunan manusia antar negara. Sedangkan BPS mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada level provinsi maupun level kabupaten/kota. BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi.

Pada komponen pendidikan, BPS menggunakan MYS bukan APS karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan PPP dengan pendekatan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan karena lebih mampu menggambarkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP).

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto 2017-2018

No	Kriteria	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup	69,39%	69,59%
2	Harapan Lama Sekolah	13,14	13,15
3	Rata-Rata Lama Sekolah	9,93%	9,94%
4	Pengeluaran per kapita disesuaikan (rp 000)	9343	9765
5	IPM		
	Capaian	71,13%	71,72%
	Pertumbuhan	1,41	

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat No.27/05/13/Th XX, 5 Mei 2018

Gambar 4. IPM Kab/Kota se Sumatera Barat

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
2016 - 2017

Kabupaten/ Kota	UHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (RP.000)		IPM		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01. Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	11,74	12,07	6,52	6,69	5.771	6.010	58,27	59,25	1,68
02. Pesisir Selatan	70,11	70,23	13,05	13,06	8,12	8,13	8.605	8.819	68,99	68,74	0,51
03. Solok	67,50	67,65	13,00	13,01	7,58	7,60	9.664	9.743	67,67	67,86	0,28
04. Sijunjung	65,33	65,44	12,27	12,34	7,50	7,72	9.895	10.093	66,01	66,60	0,89
05. Tanah Datar	68,95	69,11	13,46	13,59	8,12	8,14	10.296	10.311	70,11	70,37	0,37
06. Padang Pariaman	67,80	67,96	13,55	13,56	7,00	7,21	10.455	10.579	68,44	68,90	0,67
07. Agam	71,44	71,57	13,73	13,94	8,18	8,39	9.111	9.388	70,36	71,10	1,05
08. Limapuluh Koto	69,27	69,31	13,25	13,26	7,92	7,96	8.936	9.151	68,37	68,69	0,47
09. Pasaman	66,40	66,54	12,71	12,72	7,64	7,65	7.678	7.882	64,57	64,94	0,57
10. Solok Selatan	66,78	66,92	12,51	12,68	7,99	8,00	9.802	9.891	67,47	67,81	0,50
11. Dharmas Raya	70,30	70,44	12,39	12,40	8,23	8,24	10.781	10.851	70,25	70,40	0,21
12. Pasaman Barat	67,09	67,15	12,67	13,06	7,84	7,85	8.393	8.704	66,03	66,83	1,21
71. Kota Padang	73,19	73,20	15,87	16,15	11,24	11,32	13.721	13.957	81,06	81,38	0,64
72. Kota Solok	72,83	72,92	14,28	14,29	10,79	10,95	11.519	11.673	77,07	77,44	0,48
73. Kota Sawah Lunto	69,33	69,39	13,05	13,14	9,92	9,93	9.051	9.343	70,67	71,13	0,65
74. Kota Padang Panjang	72,45	72,46	15,02	15,03	11,42	11,43	9.804	10.240	76,50	77,01	0,67
75. Kota Bukit Tinggi	73,80	73,89	14,93	14,94	10,98	11,30	12.475	12.816	79,11	79,80	0,87
76. Kota Payakumbuh	73,03	73,13	14,22	14,23	10,30	10,45	12.705	12.858	77,56	77,91	0,45
77. Kota Pariaman	69,63	69,67	14,50	14,51	10,09	10,10	12.141	12.425	75,44	75,71	0,36
SUMATERA BARAT	68,73	68,78	13,79	13,94	8,59	8,72	10.126	10.306	70,73	71,24	0,72

Keterangan :
 UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPM Kota Sawahlunto pada Tahun 2017 sebesar 71,13 yang berada pada klasifikasi sedang dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 71,72 yang menunjukkan IPM Kota sawahlunto berada pada klasifikasi tinggi. Dari pencapaian IPM diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan di Kota Sawahlunto. Di Sumatera Barat pada tahun2018 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat. Pada tahun 2018, IPM Sumatera Barat telah mencapai 71,72, angka ini meningkat sebesar 0,58 poin dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 71,13. Pada tahun2018, indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat sudah berstatus tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pada gambar berikut dapat kita lihat angka IPG Kota Sawahlunto pada tahun 2017.

Gambar 5. IPG Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017

Kode	Provinsi/Kab/Kota	AHH		EYS		MYS		Pengeluaran per Kapita		IPM		IPG
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1300	SUMATERA BARAT	66,94	70,70	13,53	14,38	8,86	8,60	14.446	9.379	74,62	70,26	94,16
1301	Kepulauan Mentawai	62,46	66,22	12,37	11,74	7,19	6,45	8.770	5.506	64,38	57,38	89,13
1302	Pesisir Selatan	68,23	72,16	12,99	13,63	8,49	8,09	11.614	8.441	72,14	68,52	94,98
1303	Solok	65,62	69,57	12,33	13,61	7,82	7,58	13.699	9.448	70,88	67,85	95,73
1304	Sijunjung	63,45	67,31	12,15	13,05	7,76	7,59	15.415	9.161	70,56	65,90	93,40
1305	Tanah Datar	67,07	71,03	12,65	14,15	8,14	8,21	12.224	9.810	71,28	70,22	98,51
1306	Padang Pariaman	65,92	69,88	12,86	14,21	7,54	6,99	15.800	9.559	72,51	68,01	93,79
1307	Agam	69,58	73,46	13,21	14,55	8,45	8,38	11.594	8.848	72,93	70,86	97,16
1308	Lima Puluh Kota	67,28	71,23	12,89	13,58	8,24	7,96	12.691	8.727	72,12	68,24	94,62
1309	Pasaman	64,54	68,44	12,20	13,42	7,87	7,59	11.363	6.848	68,55	63,75	93,00
1310	Solok Selatan	64,91	68,83	12,37	13,31	8,20	7,89	13.248	8.849	70,76	66,90	94,54
1311	Dharmasraya	68,42	72,35	12,05	12,50	8,66	8,22	16.674	7.366	74,82	66,16	88,43
1312	Pasaman Barat	65,23	69,06	12,48	13,39	8,15	7,56	12.876	6.238	70,71	62,91	88,97
1371	Kota Padang	71,24	75,15	15,72	16,39	11,62	11,26	20.657	12.536	85,67	80,33	93,77
1372	Kota Solok	70,96	74,77	13,94	14,73	10,78	11,18	14.893	10.861	79,65	77,02	96,70
1373	Kota Sawahlunto	67,36	71,31	12,76	13,72	9,89	10,10	13.121	8.880	74,39	71,04	95,50
1374	Kota Padang Panjang	70,49	74,38	14,45	15,98	11,49	11,38	10.716	8.651	77,31	75,58	97,76
1375	Kota Bukittinggi	71,75	75,51	14,45	15,38	11,39	11,11	13.724	12.565	80,43	79,45	98,78
1376	Kota Payakumbuh	71,17	74,98	14,02	14,62	10,37	10,52	14.451	12.658	79,05	77,89	98,53
1377	Kota Pariaman	67,71	71,59	13,87	15,38	10,18	10,08	13.817	11.831	76,51	75,71	98,95

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Pada tahun 2017, IPG Kota Sawahlunto sebesar 95,50 dan menduduki peringkat 9 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan Kota Sawahlunto tergolong pada status pembangunan tinggi.

E. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG berguna untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Adapun data Angka IDG Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. IDG Kab/Kota se Sumatera Barat

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
		(%)	(%)	(%)	
1300	SUMATERA BARAT	10,77	57,64	37,40	65,01
1301	Kepulauan Mentawai	0,00	41,07	30,84	46,90
1302	Pesisir Selatan	4,44	63,48	34,05	53,46
1303	Solok	8,57	59,66	39,08	62,16
1304	Sijunjung	10,00	61,50	28,16	56,84
1305	Tanah Datar	8,57	59,15	33,42	58,41
1306	Padang Pariaman	5,00	51,55	31,10	54,48
1307	Agam	2,22	61,17	38,70	54,16
1308	Lima Puluh Kota	8,57	75,08	28,35	46,81
1309	Pasaman	8,57	55,10	38,33	63,78
1310	Solok Selatan	0,00	49,68	36,46	51,17
1311	Dharmasraya	4,00	57,19	26,76	48,91
1312	Pasaman Barat	2,50	57,33	36,36	54,42
1371	Kota Padang	15,56	53,25	34,51	69,01
1372	Kota Solok	5,00	62,44	36,19	56,20
1373	Kota Sawah Lunto	20,00	55,09	27,90	65,86
1374	Kota Padang Panjang	20,00	59,75	46,52	76,10
1375	Kota Bukittinggi	8,00	58,02	37,29	62,11
1376	Kota Payakumbuh	8,00	58,66	38,13	61,99
1377	Kota Pariaman	5,00	63,90	30,91	51,34

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa IDG Kota Sawahlunto pada tahun 2017 sebesar 65,86. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

F. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan semua penduduk, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun jenis kelamin. Pencapaian pembangunan pada umumnya dinyatakan dengan adanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya atau sebaliknya. Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian

pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran sederhana yang dapat menggambarkan pembangunan manusia.

IPM mampu menangkap kemajuan pembangunan dalam tiga kemampuan dasar manusia yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, serta untuk menikmati standar kehidupan yang layak. Walaupun IPM memberikan gambaran yang jelas tentang pembangunan manusia dan mempertimbangkan kemajuan manusia yang lebih luas, tetapi IPM belum dapat menjelaskan kesenjangan capaian pembangunan perempuan dibandingkan laki-laki. Indikator Pembangunan Manusia yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM dan Angka IPG dapat dimaknai sebagai “bias” gender dalam pembangunan.

Konkretnya, apabila angka IPG lebih kecil dari Angka IPM ($IPG < IPM$), maka terjadi ketidaksetaraan gender. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, meskipun trennya terus naik tetapi dari indikator kompositnya nilainya stagnan.

1. Tingkat Kesetaraan Gender

Bersama-sama dengan IPM, IPG dapat menggambarkan kesetaraan dalam capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan IPM, nilai IPG dihitung dengan mempertimbangkan capaian laki-laki dan perempuan, sehingga selisih antara keduanya akan menggambarkan tingkat kesetaraan gender. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya jika nilai IPG di bawah nilai IPM berarti terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui ketimpangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari besaran selisih nilai IPM dan nilai IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG menunjukkan semakin kecil perbedaan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya semakin besar selisih nilai IPM dan IPG menunjukkan semakin besar jarak (gap) capaian pembangunan perempuan dari capaian pembangunan laki-laki. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa jauh kesetaraan gender di suatu wilayah.

Sementara jika dilihat dari nilai IPM pada tahun yang sama, IPM Kota Sawahlunto Tahun 2017 mencapai 71,13, yang termasuk pada kategori pembangunan menengah atas sedangkan IPG pada tahun yang sama yaitu 95,50 yang dikategorikan tinggi. Hal ini tampak jelas mencerminkan masih terjadinya ketimpangan gender di Kota Sawahlunto.

2. Hubungan IPM dan IPG

Secara umum, IPM mencerminkan pembangunan manusia suatu daerah sedangkan IPG menggambarkan pembangunan Gender yang menitikberatkan pada perluasan kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Kedua nilai tersebut daritahun ke tahun mengalami kenaikan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Namun dibalik kenaikan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengapa masih terjadi kesenjangan atau ketidak setaraan gender yang dapat dilihat dari selisih (gap) yang tercipta antara nilai IPM dan IPG.

Seperti yang kita ketahui, jika berbicara tentang ketidaksetaraan gender maka termasuk didalamnya pemikiran mengenai bagaimana memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk berbuat maksimal dalam kehidupan. Salah satu upayanya adalah berbuat maksimal untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, proses pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan indeks pemberdayaan gender (IDG).

3. Hubungan IPG dan IDG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menitikberatkan pada pengukuran peningkatan kemampuan baik laki-laki maupun perempuan sehingga tercapai kesetaraan dalam hal pencapaian kemampuan dasar manusia. Kesetaraan dalam pencapaian bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya dari segi status dan kedudukan, tetapi lebih kepada persoalan pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperanserta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan inilah yang coba diungkap oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IDG sendiri merupakan indeks komposit yang berupaya mengungkap peran perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Secara teoritis, semakin tinggi pencapaian pembangunan gender akan berdampak pada peningkatan peranan perempuan khususnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. IDG menggambarkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik melalui indikator persentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di dunia kerja melalui indikator persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi, serta menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan.

DATA PERSPEKTIF GENDER³

BIDANG KEPENDUDUKAN

A. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai bahan monitoring dan evaluasi program pembangunan. Penduduk dalam pembangunan suatu negara sangat berperan penting, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Penduduk bisa sebagai subjek maupun objek yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan. Dengan kata lain, akhir setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Permasalahan kependudukan sering terjadi pada Negara berkembang karena tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dengan demikian proses pembangunan juga akan terganggu. Untuk pengelolaan penduduk dari segi jumlah, komposisi, dan distribusi menurut umur dan jenis kelamin harus diketahui agar dapat menunjang pembangunan.

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud dalam publikasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, jumlah penduduk Kota Sawahlunto yaitu sebanyak 66.731 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 33.583 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 33.148 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Barangin dengan jumlah 10.172 jiwa dan jumlah yang paling sedikit yaitu Kecamatan Silungkang dengan jumlah penduduk sebanyak 5.839 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel3. Data Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	Jiwa
		Jiwa	Jiwa	Jiwa
1	Barangin	10231	10172	10172
2	Lembh Segar	7114	7081	7081
3	Silungkang	5980	5839	5839
4	Talawi	10258	10056	10056
Jumlah		33583	33148	66731

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

B. Jumlah Penduduk Menurut Dokumen Kependudukan

1. Kepemilikan KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, dimana di Kota Sawahlunto adalah Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa 96,74% penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP, dimana penduduk

laki-laki sebesar 67,42% (22.644 laki-laki) dari jumlah penduduk laki-laki (33.583 laki-laki) dan perempuan sebesar 69,99% (23.201 perempuan) dari jumlah penduduk perempuan (33.148 perempuan). Hal ini menunjukkan lebih tingginya partisipasi perempuan dalam pengurusan KTP.

Tabel 4. Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Wajib KTP			Memiliki KTP			Belum Memiliki KTP		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	7156	7290	14446	6851	7067	13918	305	223	528
2	Lembah Segar	5067	5200	10267	4904	5067	9971	163	133	296
3	Silungkang	4098	4136	8234	3908	4002	7910	190	134	324
4	Talawi	7196	7243	14439	6981	7065	14046	215	178	393
Kota Sawahlunto		23517	23869	47386	22644	23201	45845	873	668	1541

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

2. Kepemilikan KK

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. dan diterbitkan oleh instansi pelaksana, dimana di Kota Sawahlunto adalah Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa setiap Kepala Keluarga sudah memiliki KK, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah Keluarga yang Memilik KK Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah KK			Jumlah KK Sudah cetak	Jumlah KK Belum Cetak
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Barangin	4964	1135	6099	6099	-
2	Lembah Segar	3373	862	4235	4235	-
3	Silungkang	2712	736	3448	3448	-
4	Talawi	4961	979	5940	5940	-
Kota Sawahlunto		16010	3712	19722	19722	-

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

3. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya.

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa 53,76% penduduk yang telah memiliki Akte Kelahiran. Persentase penduduk laki-laki yang memiliki akte kelahiran sebesar 54,10% dari seluruh penduduk laki-laki dan persentase penduduk perempuan sebesar 53,41%. Hal ini menunjukkan lebih tingginya partisipasi laki-laki dalam pengurusan Akte Kelahiran.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran
Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Memiliki Akte Kelahiran			Belum Memiliki Akte Kelahiran		
		Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	Barangin	10231	10172	20403	5694	5664	11358	4537	4508	9045
2	Lembah Segar	7114	7081	14195	3877	3828	7705	3237	3253	6490
3	Silungkang	5980	5839	11819	3053	2854	5907	2927	2985	5912
4	Talawi	10258	10056	20314	5546	5361	10907	4712	4695	9407
Kota Sawahlunto		33583	33148	66731	18170	17707	35877	15413	15441	30854

Sumber: Dinas Kependudukan&Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

4. Kepemilikan Akte Kematian

Akte Kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi Warga Negara Asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian.

Akte kematian diterbitkan untuk penduduk yang telah wafat. Penduduk tersebut akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, untuk mencegah data kependudukannya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain akta kematian, kartu keluarga yang baru juga akan diterbitkan sebagai hasil dari pelaporan kita. Akte kematian bermanfaat bagi kita untuk mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiunan janda/duda, mengurus klaim asuransi, dan juga persyaratan untuk melaksanakan perkawinan kembali.

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa 100% penduduk yang mati telah diterbitkan Akte Kematian, baik laki-laki maupun perempuan. Rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Kematian Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

N O	Kecamatan	Jumlah Penduduk Mati			Memiliki Akte Kematian			Tidak Memiliki Akte Kematian		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	44	34	78	44	34	78	-	-	-
2	Lembah Segar	30	21	51	30	21	51	-	-	-
3	Silungkang	18	14	32	18	14	32	-	-	-
4	Talawi	23	24	47	23	24	47	-	-	-
Kota Sawahlunto		115	93	208	115	93	208	-	-	-

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

5. Kepemilikan Akte Perkawinan

Akte Perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Setelah diundangkannya UU No. 1/ 1974 Jo PP No. 9/ 1975 Kantor Catatan Sipil hanya bertindak sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan bagi mereka yang beragama Non Islam dan Campuran.

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa penduduk yang tercatat dan melaporkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sebesar 45,35% dimana penduduk laki-laki sebesar 44,93% dari seluruh penduduk laki-laki, dan perempuan sebesar 45,77% dari seluruh penduduk perempuan. Rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akte Perkawinan Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin			Memiliki Akte Kawin			Tidak Memiliki Akte Kawin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	4659	4653	9312	3913	3654	7567	746	999	1745
2	Lembah Segar	3137	3161	6298	2641	2552	5193	496	609	1105
3	Silungkang	2539	2552	5091	2178	2129	4307	361	423	784
4	Talawi	4756	4807	9563	4115	4035	8150	641	772	1413
Kota Sawahlunto		15091	15173	30264	12847	12370	25217	2244	2803	5047

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

6. Kepemilikan Akte Cerai

Akte Perceraian adalah akte yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa penduduk yang tercatat dan melaporkan perceraianannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam sebesar 1,58%, dimana penduduk laki-laki sebesar 1,96% dari seluruh penduduk laki-laki, dan perempuan 2,21% dari seluruh penduduk perempuan. Rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Jumlah penduduk yang memiliki Akte Cerai menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Cerai			Memiliki Akte Cerai			Tidak Memiliki Akte Cerai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	98	248	346	46	105	151	52	143	195
2	Lembah Segar	83	166	249	39	68	107	44	98	142
3	Silungkang	59	131	190	32	58	90	27	73	100
4	Talawi	84	188	272	48	96	144	36	92	128
Kota Sawahlunto		324	733	1057	165	327	492	159	406	565

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

7. Data Penduduk Migrasi (Masuk dan Keluar)

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).

Tahun 2019 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa penduduk yang tercatat melakukan migrasi adalah penduduk laki-laki. Rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Data Penduduk Migrasi (Masuk Keluar) Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Migrasi Keluar Antar Kab/Kota dalam Provinsi			Migrasi Keluar Antar Kab/Kota Luar Provinsi			Masuk dari Kab/Kota dalam Provinsi	Masuk dari Kab/Kota Antar Provinsi	Jumlah Masuk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Barangin	35	40	75	55	38	93	103	78	181
2	Lembah Segar	61	58	119	40	32	72	57	48	105
3	Silungkang	46	41	87	30	23	53	45	25	70
4	Talawi	37	34	71	39	47	86	110	76	186
Kota Sawahlunto		179	173	352	164	140	304	315	227	542

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

C. Keluarga Berencana

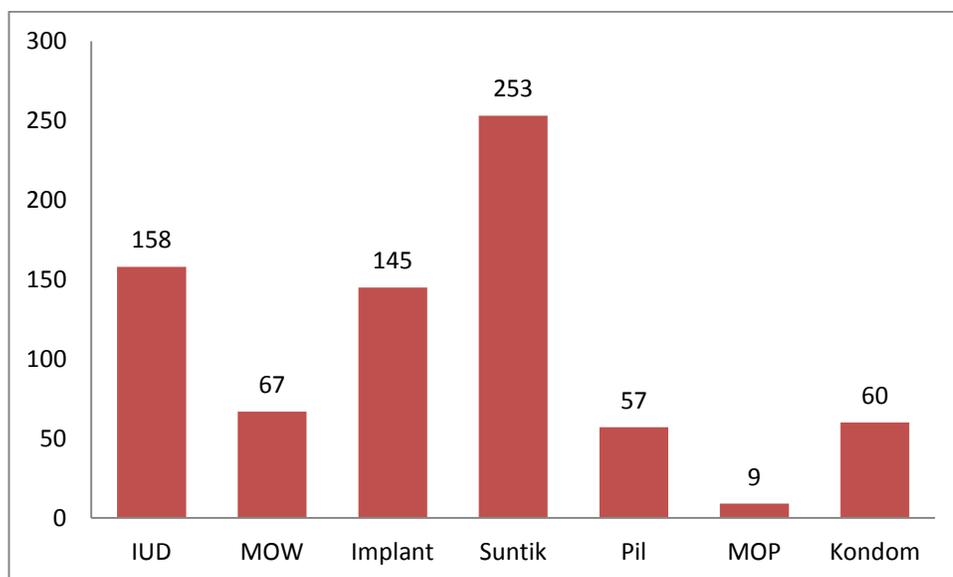
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan jumlah penduduk terutama untuk menekan angka kelahiran yang akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Sejak era otonomi daerah digulirkan yang berakibat pada desentralisasi kebijakan kependudukan, pelaksanaan program KB memang mengalami banyak kemunduran. Meskipun sudah ada upaya revitalisasi program KB nasional sejak tahun 2009 namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

**Tabel 11. Jumlah Peserta KB Baru (PB) Per Kecamatan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-laki			Total
		IUD	MOW	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah	
1	Barangin	11	0	34	61	15	121	0	8	8	129
2	Lembah Segar	100	56	29	47	9	241	7	6	13	254
3	Silungkang	15	4	31	64	10	124	1	7	8	132
4	Talawi	32	7	51	81	23	194	1	39	40	234
Kota Sawahlunto		158	67	145	253	57	680	9	60	69	749

Sumber : Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Gambar 7. Jumlah Peserta KB Baru berdasarkan Jenis Kontrasepsi di Kota Sawahlunto Tahun 2019



Sumber : Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Peserta KB baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus.

Berdasarkan gambar di atas, jumlah peserta KB baru adalah terbanyak peserta KB perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi suntik, yaitu sebanyak 253 orang dan disusul alat kontrasepsi IUD sebesar 158 orang, sedangkan jumlah peserta KB terendah adalah peserta KB pria yaitu MOP

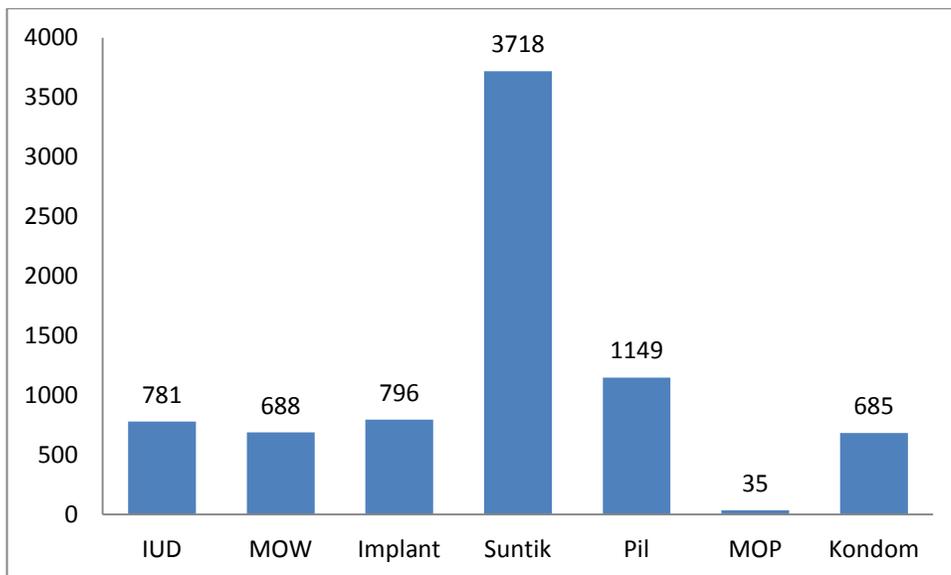
sebanyak 9 orang. Dari gambar di atas juga menunjukkan bahwa peserta KB baru masih didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 90,8% (680 peserta) dan laki-laki sebesar 9,21% (69 peserta).

Tabel 12. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-laki			Total
		IUD	MOW	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kondom	Jml	
1	Barangin	209	201	169	902	308	1789	2	168	170	1959
2	Lembah Segar	283	185	239	1023	392	2122	14	201	215	2337
3	Silungkang	83	93	153	706	171	1206	12	120	132	1338
4	Talawi	206	209	235	1087	278	2015	7	196	203	2218
Kota Sawahlunto		781	688	796	3718	1149	7132	35	685	720	7852

Sumber : Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Gambar 8. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019



Sumber : Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Berdasarkan gambar di atas bahwa jumlah peserta KB baru adalah terbanyak peserta KB perempuan yaitu sebanyak 3718 orang pengguna alat kontrasepsi suntik dan jumlah peserta KB terendah adalah peserta KB pria yaitu MOP sebanyak 35 orang. Dari gambar di atas juga menunjukkan bahwa peserta KB aktif masih didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 90,83% (7.132 orang) dan laki-laki sebesar 9,16% (720 orang).

**Tabel 13. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
Per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Barangin	1	2	3
2	Lembah Segar	0	2	2
3	Silungkang	1	1	2
4	Talawi	0	2	2
Kota Sawahlunto		2	7	9

Sumber : Dinkesdalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia, peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi penting untuk mendorong terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Tenaga KB bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga berencana di lapangan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PKB di Kota Sawahlunto sebanyak 9 orang, dimana 22% (2 orang) PKB adalah laki-laki. Artinya peran laki-laki dalam pembangunan KB masih rendah dan dari kecukupan jumlah tenaga PKB juga masih rendah. Artinya di Kota Sawahlunto dengan 37 Desa/Kelurahan membutuhkan 37 PKB, sedangkan tenaga yang tersedia hanya 9 orang. Hal ini mempengaruhi pencapaian Akseptor KB baru dan program KB lainnya.

D. Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 14. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah KK Laki-laki	Jumlah KK Perempuan	Total
1	Barangin	4964	1135	6099
2	Lembah Segar	3373	862	4235
3	Silungkang	2712	736	3448
4	Talawi	4961	979	5940
Kota Sawahlunto		16010	3712	19722

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Secara implisit dalam batasan ini adalah anak yang belum menikah. Kepala keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda/duda yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suami atau anak-anaknya.

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa perempuan sebagai kepala keluarga sebesar 18,82% (3.712 KK) dan laki-laki sebesar 81,17% (16.010 KK) di Kota Sawahlunto pada tahun 2019.

E. Anak yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 15. Jumlah Anak (Umur < 18 Tahun) Yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Umur 0-18 Tahun			Umur 0-18 Tahun (memiliki Akte)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	3461	3254	6715	3327	3123	6450
2	Lembah Segar	2303	2138	4441	2230	2083	4313
3	Silungkang	2135	1909	4044	2064	1839	3903
4	Talawi	3467	3182	6649	3340	3092	6432
Kota Sawahlunto		11366	10483	21849	10961	10137	21098

Sumber: Dinas Kependudukan & Capil Kota Sawahlunto Tahun 2019

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak sipil anak adalah mendapatkan akte kelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa anak yang memiliki akte kelahiran adalah sebanyak 96,56% dari anak yang ada di Kota Sawahlunto, 51,95% anak laki-laki dan 48,04% anak perempuan.

DATA PERSPEKTIF GENDER 4

BIDANG PENDIDIKAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatannya yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

A. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan hasil dari pembangunan bidang pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertinggi. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

ditandai dengan sertifikat/ijazah yang dimiliki. Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.

Semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tertinggi menunjukkan semakin baik sistem pendidikan yang dijalankan. Berikut akan disajikan data penduduk dengan kepemilikan ijazah tertinggi dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 16. Data Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Pendidikan Ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Total Penduduk	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Tidak/Belum Sekolah	7.342	11,52	7.195	11,32	14.537	22,87
2	Belum Tamat SD	4.673	7,35	4.334	6,82	9.007	14,17
3	Tamat SD	5.858	9,22	5.693	8,96	11.551	18,17
4	Tamat SLTP	4.664	7,34	4.305	6,77	8.969	14,11
5	Tamat SLTA	7.344	11,55	6.951	10,94	14.295	22,49
6	D I/D II	186	0,29	513	0,81	699	1,10
7	DIII/Sarjana Muda	467	0,73	788	1,24	1.255	1,97
8	D IV/S1	1.193	1,88	1.879	2,96	3.072	4,83
9	S2	91	0,14	83	0,13	174	0,27
10	S3	1	0,00	0	00,00	1	0,00
Jumlah		31.819	50,06	31,741	49,94	63.560	100,00

Sumber: Data Agregat Semester I Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau year of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah

diikuti. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Tabel 17. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018

No	Kab/Kota	JK		L+P
		L	P	
1	Sawahlunto			9,93

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

C. APS, APM, dan APK

Partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi sekolah penduduk pada kelompok umur tertentu. Dilihat menurut kelompok umur terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah penduduk maka angka partisipasi sekolahnya akan semakin kecil.

APS merupakan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indicator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator APS digunakan sebagai ukuran daya serap system pendidikan nasional terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. APS Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur tahun 2018

No	Kab/Kota	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sawahlunto	394,98	396,49	791,47	285,78	287,99	573,77	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat

penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Angka partisipasi murni sekolah menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah murni pada berbagai usia sekolah. Dilihat menurut jenjang pendidikan terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi murni sekolah akan semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan semakin tingginya angka putus sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dengan demikian, APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 19. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan Tahun 2018

No	Kab/Kota	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sawahlunto	368,47	367,89	736,36	261,92	277,86	539,78	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk pada berbagai jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar dapat bernilai lebih dari seratus persen karena penduduk yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu bisa saja diluar rentang usia yang seharusnya bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Artinya data menggambarkan jumlah anak yang sedang bersekolah pada saat tertentu pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan Tahun 2018

No	Kab/Kota	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sawahlunto	414,2	399,16	813,36	361,72	373,28	735			

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

D. Angka Buta Huruf

Buta huruf adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan suatu masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kegiatan membaca dapat dipandang sebagai jantungnya pendidikan. Melalui kegiatan membaca, setiap orang dapat mengikuti perkembangan baru yang terjadi dalam kehidupan. Di

dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Begitu pentingnya tingkat keaksaraan, sehingga penuntasan buta aksara menjadi suatu yang sangat diperlukan.

Penuntasan buta aksara merupakan suatu investasi sumber daya manusia yang mempengaruhi berbagai aspek-aspek lain seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Keseriusan pemerintah juga terlihat dengan dikeluarkannya Inpres RI No 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan Program Keaksaraan Fungsional (KF).

Adapun data jumlah penduduk 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan kemampuan baca tulis di Kota Sawahlunto tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21. Data Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur Dan Kemampuan Baca Tulis Di Kota Sawahlunto Tahun 2015

No	Jenjang Pendidikan	Kemampuan Baca		
		Bisa	Tidak	Jumlah
1	15-24	100	-	100
2	25-44	99,28	0,72	100
3	45+	98,40	1,60	100
Jumlah		99,07	0,93	100

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2017

E. Putus Sekolah

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya, dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 49 juga disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Namun, pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan seluas-luasnya hingga menyebabkan mereka putus sekolah. Putus sekolah

didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan tersebut.

DATA PERSPEKTIF GENDER 5 BIDANG KESEHATAN

A. Pendahuluan

Pembangunan Kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa, dan murah. Pembangunan kesehatan mewujudkan keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara nasional, pembangunan kesehatan telah berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan penduduk.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Pembangunan di Kota Sawahlunto khususnya Pembangunan Kesehatan juga telah diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

B. Pelayanan Kesehatan Ibu

1. Angka Kematian Ibu Maternal

**Tabel 22. Cakupan Angka Kematian Ibu Maternal
Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
1	Barangin	Kolok	115	1
		Sungai Durian	197	-
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	109	-
		Lunto	60	-
3	Silungkang	Silungkang	176	-
4	Talawi	Talawi	341	2
Jumlah			998	3

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu maternal adalah sebanyak 3 kasus kematian ibu pada masa nifas (42 hari setelah melahirkan).

2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi lahir sebahagian besar terjadi pada masa persalinan. Salah satunya disebabkan karena masih adanya pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga non kesehatan atau yang tidak mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Linakes) di Kota Sawahlunto sampai tahun 2019 adalah sebanyak 994 kelahiran atau sebesar 99,79%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto

NO	Kecamatan	Puskesmas	Penolong Persalinan	
			Nakes	Non Nakes
1	Barangin	Kolok	113	2
		Sungai Durian	198	-
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	59	-
		Lunto	108	-
3	Silungkang	Silungkang	178	-
4	Talawi	Talawi	338	-
Jumlah			994	2

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 24. Cakupan Ibu Bersalin / Nifas Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Vit A Per Kecamatan dan Puskesmas Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Bersalin / Nifas			
			Mendapat Yankes		Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Barangin	Kolok	97	66,4	115	78,8
		Sungai Durian	198	80,8	198	80,8
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	108	71,1	108	71,1
		Lunto	57	61,3	59	63,4
3	Silungkang	Silungkang	176	85,9	178	86,8
4	Talawi	Talawi	338	74,9	337	74,7
Jumlah			974	440,4	995	77

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Ante Natal Care)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja.

Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Cakupan ANC di Kota Sawahlunto pada selama tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 Dan K4 Per Kecamatan Dan Puskesmas Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Hamil			
			K1		K4	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Barangin	Kolok	124	78	86	54,1
		Sungai Durian	243	91,7	184	69,4
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	68	76,4	55	56,7
		Lunto	126	70,1	115	69,7
3	Silungkang	Silungkang	188	88,3	140	65,7
4	Talawi	Talawi	356	78,4	294	64,8
Jumlah			1105	81,7	874	64,6

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan K1 di Kota Sawahlunto tahun 2019, yaitu sebanyak 1105 orang atau sebesar 81,7%. Sedangkan untuk cakupan pemeriksaan lengkap pada ibu hamil (K4) pada periode yang sama adalah sebanyak 874 orang atau sebesar 64,6%.

Tabel 26. Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Fe1 Dan Fe 3 Per Kecamatan Dan Puskesmas Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Hamil			
			Fe1 (30 Tablet)		Fe3 (90 Tablet)	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Barangin	Kolok	124	78	112	70,4
		Sungai Durian	243	91,7	217	81,9
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	68	76,4	117	70,9
		Lunto	126	70,1	56	57,7
3	Silungkang	Silungkang	188	88,3	133	62,4
4	Talawi	Talawi	356	78,4	341	75,1
Jumlah			1105	81,7	976	72,1

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 27. Persentase Cakupan Imunisasi TD Pada Ibu Hamil Per Kecamatan Dan Puskesmas Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Puskesmas	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Imunisasi TD					
			TD 1	TD 2	TD 3	TD 4	TD 5	TD 2+
1	Barangin	Kolok	1	2	-	-	12	14
		Sungai Durian	-	-	-	-	7	7
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	-	-	-	2	2	4
		Lunto	-	-	-	1	5	6
3	Silungkang	Silungkang	-	-	1	3	5	9
4	Talawi	Talawi	4	3	31	56	42	132
Jumlah			5	5	32	62	73	172

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

C. PELAYAN KESEHATAN ANAK

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Anak Balita (AKABA)

**Tabel 28. Jumlah Kematian Bayi (AKB) Dan Balita (AKABA)
Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Puskesmas	AKB			Akaba		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	Kolok	4	3	7	4	3	7
		Sungai Durian	1	1	2	1	2	3
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	0	0	0	1	0	1
		Lunto	2	0	2	2	0	2
3	Silungkang	Silungkang	3	0	3	3	1	4
4	Talawi	Talawi	6	2	8	8	2	10
Jumlah			16	6	22	19	8	27
Angka Kematian (Dilaporkan)			31,8	12,1	22	37,7	16,2	27,1

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

2. Bayi dengan ASI Eksklusif (0-6 Bulan)

Air Susu Ibu (ASI) terutama Colostrum merupakan bahan yang mengandung zat kekebalan tubuh bagi bayi dan juga dapat melindungi bayi dari sindrom kematian secara mendadak (Sudden Infant Death Syndrome/SIDS). Selain itu ASI merupakan makanan satu-satunya yang mempunyai kandungan gizi paling lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai berusia 6 bulan. Dan akan menjadi lebih sempurna jika pemberian ASI ini dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun.

Dengan hanya memberikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, akan menjamin penyerapan makanan di dalam tubuh bayi akan berlangsung secara sempurna sehingga secara tidak langsung kita telah berupaya untuk memelihara alat pencernaan bayi.

Interaksi selama menyusui akan berpengaruh terhadap aspek psikologi ibu dan bayi. Ikatan kasih sayang antara keduanya akan semakin erat. Menyusui bayi juga sangat ekonomis karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli susu formula dan perlengkapannya. Selain itu, menyusui secara eksklusif dapat menunda haid sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi alami yang dikenal sebagai Metode Amenorhea Laktasi (MAL).

Tahun 2019 cakupan Bayi ASI Eksklusif dengan persentase terbesar terdapat pada Kecamatan Talawi sebesar 92,4% (339 bayi). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 29. Cakupan Bayi ASI Eksklusif di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	%
1	Barangin	Kolok	59	72,8
		Sungai Durian	139	89,1
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	87	82,9
		Lunto	56	82,4
3	Silungkang	Silungkang	147	86
4	Talawi	Talawi	339	92,4
Kota Sawahlunto			827	87,2

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

3. Penderita HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari Human immunodeficiency virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV.

HIV ditemukan di dalam cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Cairan yang dimaksud adalah cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah dan ASI. HIV tidak bisa menyebar melalui keringat atau urine. Pengobatan HIV yang terbaik adalah dengan cara mencegah HIV dengan cara melakukan hubungan seks secara aman.

Cakupan penderita HIV/AIDS di Kota Sawahlunto selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Cakupan Penderita HIV / AIDS Berdasarkan Kelompok Umur Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kelompok Umur	HIV			AIDS		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	≤ 4 Tahun	-	-	-	-	-	-
2	5 - 14 Tahun	-	1	1	-	-	-
3	15 - 19 Tahun	-	-	-	-	-	-
4	20 - 24 Tahun	1	2	3	-	-	-
5	25 - 49 Tahun	-	1	1	3	-	3
6	≥ 50 Tahun	-	1	1	-	-	-
Kota Sawahlunto		1	5	6	3	0	3

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

4. Posyandu

**Tabel 31. Jumlah Posyandu Menurut Strata
Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Strata Posyandu				Jumlah
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	Barangin	-	4	-	27	31
2	Lembah Segar	-	3	-	26	29
3	Silungkang	-	-	8	11	19
4	Talawi	-	-	-	24	24
Kota Sawahlunto		-	7	8	88	103

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Pencapaian realisasi indikator program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Sawahlunto secara statistik gender dan data terpilah secara umum ada yang naik dan ada juga yang turun. Untuk ke depan beberapa program dan kegiatan seperti promosi kesehatan dan kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas di samping program dan kegiatan yang lainnya. Bersama angka kesakitan dan Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi elemen kunci yang sering dijadikan tolok ukur dan kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan.

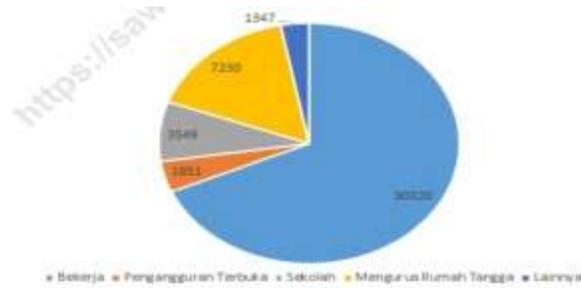
DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG 6 EKONOMI DAN TENAGA KERJA

A. Penduduk dan Kegiatan Utama

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Lapangan pekerjaan ini terbagi menjadi sembilan sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik Gas dan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa. Analisis yang dilakukan hanya akan memuat lima lapangan usaha terbesar yaitu; pertanian, industri, perdagangan dan jasa, sementara sisanya akan masuk pada sektor lainnya.

Gambar 9. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama



Di seluruh dunia pekerjaan kaum perempuan lebih terbatas dan lebih sempit dibandingkan laki-laki. Pekerjaan yang sering didefinisikan sebagai pekerjaan perempuan adalah pekerjaan dengan pembayaran yang rendah, status yang rendah dan tingkat keamanan yang minim. Berikut akan disajikan data mengenai jenis pekerjaan menurut jenis kelamin di Kota Sawahlunto untuk melihat variasi pekerjaan yang banyak dilakoni oleh perempuan Kota Sawahlunto, sebagai berikut:

Tabel 32. Data Jenis Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin Kota Sawahlunto

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Jiwa
		Jiwa	Jiwa	
1.	Belum/Tidak Bekerja	7.400	6.546	13.946
2.	Mengurus Rumah Tangga	7	13.966	13.973
3.	Pelajar/Mahasiswa	7.405	7.194	14.599
4.	Pensiunan	1.040	710	1.750
5.	Pegawai Negeri Sipil	973	1.629	2.602
6.	Tentara Nasional Inonesia	28	0	28
7.	Kepolisian RI (POLRI)	155	7	162
8.	Perdagangan	153	56	209
9.	Petani/Pekebun	2.894	379	3.273
10.	Peternak	18	3	21
11.	Nelayan/Perikanan	4	0	4
12.	Industri	13	21	34
13.	Konstruksi	20	2	22
14.	Transportasi	44	1	45
15.	Karyawan Swasta	2.239	512	2.751
16.	Karyawan BUMN	300	40	340
17.	Karyawan BUMD	33	16	49
18.	Karyawan Honorer	573	705	1.278
19.	Buruh Harian Lepas	3.461	46	3.507
20.	Buruh Tani/Perkebunan	205	19	224
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	-	-	0
22.	Buruh Peternakan	3	1	4

23.	Pembantu Rumah Tangga	1	22	23
24.	Tukang Cukur	14	-	14
25.	Tukang Batu	119	-	119
26.	Tukang Kayu	96	-	96
27.	Tukang Sol Sepatu	4	-	4
28.	Tukang Las/Pandai Besi	18	-	18
29.	Tukang Jahit	41	28	69
30.	Tukang Gigi	2	-	2
31.	Mekanik	114	-	114
32.	Seniman	6	-	6
33.	Tabib	1	-	1
34.	Paraji	-	-	-
35.	Imam Mesjid	8	-	8
36.	Pendeta	1	-	1
37.	Pastor	-	-	-
38.	Wartawan	14	1	15
39.	Ustadz/Mubaligh	10	0	10
40.	Walikota	1	-	1
41.	Wakil Walikota	1	-	1
42.	Anggota DPRD Kab./Kota	7	3	10
43.	Dosen	11	10	21
44.	Guru	50	270	320
45.	Pengacara	2	-	2
46.	Notaris	1	-	1
47.	Konsultan	6	-	6
48.	Dokter	8	21	29
49.	Perawat	14	53	67
50.	Pelaut	5	-	5
51.	Sopir	719	2	721
52.	Pedagang	809	172	981
53.	Perangkat Desa	118	132	250
54.	Kepala Desa	17	-	17
55.	Wiraswasta	4147	379	4.526
56.	Penata Rias	1	3	4
57.	Penata Busana	-	-	-
58.	Penata Rambut	2	3	5
59.	Penerjemah	-	-	-
60.	Juru Masak	1	1	2
61.	Bidan	-	51	51
62.	Apoteker	-	5	5
63.	Penyiar Radio	-	3	3
64.	Pekerjaan Lainnya	18	2	20
Jumlah		33.355	33.014	66.369

Sumber: Data Agregat Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

B. Partisipasi Perempuan dalam Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya Koperasi Pegawai Negeri Sipil, atau Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan simpan pinjam kepada anggotanya, dan lain sebagainya. Kota Sawahlunto memiliki 19 jenis koperasi pada 4 kecamatan. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33. Partisipasi Perempuan sebagai Anggota Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Anggota			RAT (Unit)	% RAT
					Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	KUD	2	2	4	218	154	372	1	25%
2	Koperasi Industri	1	0	1	66	110	176	1	100%
3	KPRI	22	1	23	1119	1904	3023	22	96%
4	Koperasi Karyawan	3	1	4	687	54	741	3	75%
5	Koperasi Angkutan	0	1	1	34	5	39	-	0%
6	Koperasi Serba Usaha	4	3	7	219	358	577	4	57%
7	Koperasi Pasar	3	0	3	168	461	629	3	100%
8	Koperasi Simpan Pinjam	3	1	4	93	259	352	3	75%
9	KSPPS	1	1	2	214	332	546	1	50%
10	Koperasi Wanita	5	1	6	35	548	583	4	67%
11	Koperasi Veteran	1	0	1	39	14	53	1	100%
12	Koperasi Pabrik	1	0	1	18	26	44	1	100%
13	Koperasi Wredatama	0	1	1	115	13	128	-	0%
14	Koperasi Pertanian	1	3	4	224	152	376	1	25%
15	Koperasi Kepolisian	1	0	1	269	17	286	1	100%
16	Koperasi PKL	1	0	1	59	57	116	1	100%
17	Koperasi Lain-lain	2	0	2	63	112	175	1	50%
18	Koperasi Pertambangan	1	0	1	13	9	22	1	100%
19	Koperasi Sekunder	1	0	1	186	547	733	1	100%
Jumlah		53	15	68	3839	5132	8971	50	

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2019

**Tabel 34. Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi
Per Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Jumlah Koperasi			Anggota		
		Total	Aktif	Tidak Aktif	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	28	22	6	1543	2105	3648
2	Lembah Segar	19	16	3	1326	1390	2716
3	Silungkang	7	5	2	294	300	594
4	Talawi	14	10	4	677	1337	2014
Jumlah		68	53	15	3840	5132	8972

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan dan laki-laki untuk ikut sebagai anggota koperasi hampir berimbang, bahkan lebih tinggi partisipasi perempuan. Pada KPRI, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Wanita, dan Koperasi Sekunder, partisipasi perempuan lebih dari 50% dari seluruh anggotanya. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan berminat cukup tinggi sebagai anggota koperasi, hal ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi kaum perempuan dan dapat meningkatkan kiprah perempuan dalam masyarakat.

Tetapi ada beberapa koperasi dengan anggota perempuan yang kurang dari 50 % diantaranya Koperasi Karyawan, Koperasi Wredatama dan Koperasi Kepolisian. Diharapkan ke depan kiprah perempuan untuk ikut berpartisipasi pada koperasi tersebut terus meningkat sehingga perempuan dapat lebih maju dan berdaya.

**Tabel 35. Partisipasi Perempuan Sebagai Pengurus Koperasi
Menurut Jenis Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Kelompok Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Manajer			Karyawan		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	KUD	2	2	4	1	0	1	2	7	9
2	Koperasi Industri	1	0	1	0	0	0	0	2	2
3	KPRI	22	1	23	0	1	1	3	10	13
4	Koperasi Karyawan	3	1	4	4	7	11	21	26	47
5	Koperasi Angkutan	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Koperasi Serba Usaha	4	3	7	0	0	0	0	10	10

7	Koperasi Pasar	3	0	3	0	0	0	2	4	6
8	Koperasi Simpan Pinjam	3	1	4	0	0	0	1	8	9
9	KSPPS	1	1	2	0	0	0	0	5	5
10	Koperasi Wanita	5	1	6	0	0	0	0	0	0
11	Koperasi Veteran	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Koperasi Pepabri	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13	Koperasi Wredatama	0	1	1	0	0	0	0	0	0
14	Koperasi Pertanian	1	3	4	0	0	0	0	1	1
15	Koperasi Kepolisian	1	0	1	0	0	0	1	2	3
16	Koperasi PKL	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17	Koperasi Lain-lain	2	0	2	0	0	0	0	0	0
18	Koperasi Pertambangan	1	0	1	0	0	0	0	0	0
19	Koperasi Sekunder	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah		53	15	68	5	8	13	30	75	105

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 36. Partisipasi Perempuan Sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2019

N O	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Manajer			Karyawan		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	22	6	28	0	0	0	2	19	21
2	Lembah Segar	16	3	19	4	7	11	15	33	48
3	Silungkang	5	2	7	0	0	0	1	3	4
4	Talawi	10	4	14	1	1	2	12	20	32
Jumlah		53	15	68	5	8	13	30	75	105

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari jumlah koperasi yang ada, telah mampu menyerap tenaga kerja/ karyawan yang kondisinya sebagaimana terdapat pada tabel di atas.

Dari data di atas terlihat bahwa secara umum perempuan lebih banyak dari laki-laki yang bekerja sebagai karyawan koperasi. Ini menunjukkan bahwa perempuan sudah bisa bersaing secara kompetensi dengan laki-laki dalam dunia kerja, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian

dan kerapihan, perempuan masih diprioritaskan. Dalam pelaksanaan administrasi koperasi, dapat dilihat bahwa dengan turutsertanya perempuan sebagai karyawan koperasi, tertib administrasi pada koperasi secara umum sudah baik, meskipun masih ada beberapa koperasi yang belum tertata rapi administrasinya.

C. Kiprah Perempuan dalam Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)

Kota Sawahlunto sangat potensial terhadap pertumbuhan Industri, baik industri kecil maupun menengah. Kota Sawahlunto memiliki 15 sentra, jumlah unit usaha yang tergabung dalam sentra tersebut sebanyak 846 unit usaha dengan anggota berjumlah 861 anggota. Sentra adalah sekumpulan unit usaha yang memproduksi produk tertentu dan berada dalam lokasi tertentu yang berdekatan. Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Kiprah Perempuan Dalam Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah

NO	Nama Sentra	Kecamatan	Jumlah Sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Anggota	Pengelola	
						Laki-laki	Perempuan
1	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Lumindai	Barangin	4	55	55	1	54
2	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Balai Batu Sandaran	Barangin		26	27		27
3	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Talago Gunung	Barangin		5	5		5
4	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Santur	Barangin		13	13		13
5	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Lunto Barat	Lembah Segar	6	59	60	3	57
6	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Lunto Timur	Lembah Segar		187	187	21	166
7	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Pasar Kubang	Lembah Segar		53	62	1	61

8	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Kubang Tengah	Lembah Segar		46	46	3	43
9	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Kubang Utara Sikabu	Lembah Segar		23	23	2	21
10	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Kubang Sirakuk Selatan	Lembah Segar		13	13		13
11	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Silungkang Oso	Silungkang	4	135	135	7	128
12	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Silungkang Duo	Silungkang		49	49	1	48
13	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Silungkang Tigo	Silungkang		142	146	18	128
14	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Muaro Kalaban	Silungkang		26	26	1	25
15	Sentra Tenun Songket Silungkang Desa Talawi Mudik	Talawi	1	14	14		14
Jumlah			15	846	861	58	803

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2019

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa perempuan juga ikut berperan dalam Industri Kecil Menengah Kota Sawahlunto, terutama Sentra Tenun Songket. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah pengelola perempuan pada sentra tersebut lebih dari jumlah pengelola laki-laki. Pengelola sentra industri perempuan sebanyak 803 orang sedangkan pengelola sentra industri laki-laki sebanyak 58 orang.

Tabel 38. Jumlah UMKM Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jenis Usaha	Status Usaha UMKM (Jenis Kelamin)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Barangin	Perdagangan, Industri, Jasa, Perikanan, dan Jasa Lainnya	166	189	355

2	Lembah Segar	Perdagangan, Industri, Jasa, Perikanan, dan Jasa Lainnya	1.569	1.580	3.149
3	Silungkang	Perdagangan, Industri, Jasa, Perikanan, dan Jasa Lainnya	1.087	1.088	2.175
4	Talawi	Perdagangan, Industri, Jasa, Perikanan, dan Jasa Lainnya	131	127	258
JUMLAH			2.953	2.984	5.937

Sumber : Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2019

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Besarnya partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Untuk melihat besar-kecilnya kontribusi, serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator utamayang sering dipakai untuk melihat perkembangan di bidang ketenagakerjaan.

Peningkatan TPAK perempuan erat hubungan dengan pencapaian tingkat pendidikan perempuan. Biasanya semakin banyak perempuan yang menamatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diikuti pula oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja perempuan lebih mendominasi pada sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri. Masuknya perempuan pada pasar kerja di dorong oleh kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga. TPAK Kota Sawahlunto pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Kabupaten/Kota 2018**

No	Kabupaten/Kota	TPAK
		2017
1	Sumatera Barat	66,29
2	Kep. Mentawai	77,95
3	Kab. Pessel	64,03
4	Kab. Solok	67,50
5	Kab. Sijunjung	68,21
6	Kab. Tanah Datar	66,51
7	Kab. Padang Pariaman	64,12
8	Kab. Agam	66,07

9	Kab. Lima Puluh Kota	72,63
10	Kab. Pasaman	70,63
11	Kab. Solok Selatan	69,19
12	Kab. Dharmasraya	64,53
13	Kab. Pasaman Barat	68,63
14	Kota Padang	61,15
15	Kota Solok	66,29
16	Kota Sawahlunto	70,44
17	Kota Padang Panjang	64,17
18	Kota Bukittinggi	65,23
19	Kota Payakumbuh	71,42
20	Kota Pariaman	65,20

Sumber: BPS Sumatera Barat

E. Pengangguran

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, mencari pekerjaan baik secara aktif maupun pasif. Terjadinya pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dampak sosial dan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran tidak dapat dianggap enteng.

1. Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik yang mereka kuasai.

Tingkat pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan tertentu (sebagai kelompok terdidik) terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok pendidikan tersebut.

2. Pengangguran Terbuka

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka umumnya didefinisikan secara konvensional sebagai

proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja disebuah negara atau wilayah.

Pengangguran Terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. *Pengangguran terbuka*, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Adapun TPT menurut kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 40. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	TPAK			
		2015	2016	2017	2018
1	Kep. Mentawai	1,25	-	1.96	2.27
2	Kab. Pessel	11,69	-	5.95	5.85
3	Kab. Solok	3,97	-	6.05	5.92
4	Kab. Sijunjung	4,26	-	3.32	3.20
5	Kab. Tanah Datar	4,46	-	3.72	3.86
6	Kab. Padang Pariaman	5,80	-	6.65	6.90
7	Kab. Agam	6,05	-	4.23	4.82
8	Kab. Lima Puluh Kota	3,78	-	2.60	2.70
9	Kab. Pasaman	5,06	-	6.81	5.88
10	Kab. Solok Selatan	6,30	-	5.54	5.85
11	Kab. Dharmasraya	3,51	-	3.69	3.94
12	Kab. Pasaman Barat	3,79	-	3.99	3.37
13	Kota Padang	14	-	9.44	9.18
14	Kota Solok	4,72	-	5.88	5.97
15	Kota Sawahlunto	7,18	-	6.19	5.75
16	Kota Padang Panjang	6,33	-	5.43	5.28
17	Kota Bukittinggi	6,04	-	6.94	7.15
18	Kota Payakumbuh	7,07	-	3.45	3.78
19	Kota Pariaman	6,61	-	5.97	5.72

Sumber: BPS Sumatera Barat

7 BIDANG HUKUM, SOSIAL, BUDAYA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Bidang Hukum

1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Tabel 41. Jumlah Dan Jenis Lapas Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Nama Lapas	Jenis Lapas / Rutan			Kecamatan
		Umum	Anak	Wanita	
1	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sawahlunto	1	-	-	Lembah Segar
Jumlah		1	-	-	

Sumber : Rutan Klas IIB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, sedangkan Rumah Tahanan Negara yang dikenal dengan RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. Di Kota Sawahlunto terdapat 1 RUTAN jenis umum yang terletak di Kecamatan Lembah Segar.

Tabel 42. Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Kelamin Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Nama Lapas	Laki-Laki	Wanita	Anak
1	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sawahlunto	137	2	1
Jumlah		137	2	1

Sumber : Rutan Klas IIB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 43. Jumlah Penghuni Lapas Kelas II B Kota Sawahlunto Menurut Jenis Kelamin Dan Jenjang Pendidikan Di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Jenis Kelamin	Pendidikan				
		TK	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Laki-laki	-	76	48	31	4
2	Wanita	-	1	-	-	1
3	Anak-anak	-	-	1	-	-
Jumlah		0	77	49	31	5

Sumber : Rutan Klas IIB Kota Sawahlunto Tahun 2019

**Tabel 44. Jumlah Penghuni Lapas Kelas II B Kota Sawahlunto
Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur
Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Jenis Kelamin	SD - 12	13 – 17	18 - 22	23 - 27	28 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 49	50 Ke Atas
1	Laki- laki	-	-	18	30	8	37	22	21	4
2	Wanita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
3	Anak - anak	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	18	30	9	37	23	21	5

Sumber : Rutan Klas IIB Kota Sawahlunto Tahun 2019

**Tabel 45. Jumlah Penghuni Lapas Kelas II B Kota Sawahlunto
Menurut Jenis Kelamin Dan Kasus
Di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

NO	Jenis Kelamin	Kasus								
		Pemb unuh an	Nark oba	Pencur ian	Perli ndun gan Anak	Kesusil aan	KDRT	Korup	Penga niaya an	Lainnya
1	Laki - laki	-	50	56	12	-	3	1	2	13
2	Wanita	-	-	1	-	-	-	-	-	2
3	Anak - anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0	50	57	12	0	3	1	2	15

Sumber : Rutan Klas IIB Kota Sawahlunto Tahun 2019

2. Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender

**Tabel 46. Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender di Kota Sawahlunto
Tahun 2019**

No	Kota Sawahlunto	Nomor	Tentang	Perangkat Daerah Pemrakarsa
A	Peraturan Daerah			
1	Peraturan Daerah	8 Tahun 2013	Penyelenggaraan Pendidikan	Disdik
2	Peraturan Daerah	3 Tahun 2014	Kawasan tanpa Rokok	
3	Peraturan Daerah	4 Tahun 2014	Perlindungan Perempuan dan Anak	DinsosPMDPPA

4	Peraturan Daerah	1 Tahun 2016	Pemberian ASI Eksklusif	DindesdaldukKB
5	Peraturan Daerah	6 Tahun 2017	Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	
6	Peraturan Daerah	11 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Disdik
B	Peraturan Walikota			
1	Peraturan Walikota	32 Tahun 2012	Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto	Kesbangpol
2	Peraturan Walikota	29 Tahun 2015	Pemberantasan Buta Aksara di Kota Sawahlunto	
3	Peraturan Walikota	2 Tahun 2016	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Disdik
4	Peraturan Walikota	34 Tahun 2016	RAD Pengembangan KLA	DinsosPMDPPA
5	Peraturan Walikota	35 Tahun 2017	RAD PUG Kota Sawahlunto	DinsosPMDPPA
6	Peraturan Walikota	20 Tahun 2018	PUG Kota Sawahlunto	DinsosPMDPPA
7	Peraturan Walikota	39 Tahun 2019	Penyelenggaraan Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Inklusi Kota Sawahlunto	DinkesdaldukKB
C	Keputusan Walikota			
1	Keputusan Walikota	17 Tahun 2017	Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	DinkesdaldukKB
2	Keputusan Walikota	282 Tahun 2017	Penetapan tim pengelolaan Kelas Ibu Hamil, kelas balita & Posyandu terintegrasi bina keluarga Balita & Pendidikan anak usia dini dalam rangka pemanfaatan buku kesehatan Ibu & Anak Tahun 2017	DinkesdaldukKB

3	Keputusan Walikota	379 Tahun 2017	penetapan hasil permuktahiran mandiri rumah tangga miskin Kota Sawahlunto tahun 2017	Barenlitbangda
4	Keputusan Walikota	12 Tahun 2018	Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSPNaker
5	Keputusan Walikota	151 Tahun 2018	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Sawahlunto	DinsosPMDPPA
6	Keputusan Walikota	19 Tahun 2019	Pedoman pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif	DinkesdaldukKB
7	Keputusan Walikota	39 Tahun 2019	Penyelenggaraan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Inklusi Kota Sawahlunto	DinkesdaldukKB
8	Keputusan Walikota	76 Tahun 2019	pembentukan Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Kota Sawahlunto	DinsosPMDPPA
9	Keputusan Walikota	83 Tahun 2019	Penetapan tim penilaian lomba sekolah sehat Kota Sawahlunto Tahun 2019	Disdik
10	Keputusan Walikota	89 Tahun 2019	penetapan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu, bina keluarga balita & pendidikan anak usia dini Kota Sawahlunto Tahun 2019	DinsosPMDPPA
11	Keputusan Walikota	102 Tahun 2019	pembentukan tim penggerak perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Kota Sawahlunto	DinsosPMDPPA

12	Keputusan Walikota	168 Tahun 2019	penetapan tim Audit Medik keluarga Berencana (KB) Kota Sawahlunto	DinkesdaldukKB
13	Keputusan Walikota	207 Tahun 2019	penetapan koperasi, usaha mikro, kecil & menengah berprestasi Kota Sawahlunto Tahun 2019	Diskoperindag
14	Keputusan Walikota	210 Tahun 2019	perubahan atas keputusan walikota no 7 tahun 2019 tentang Pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat desa & Kel se-Kota Sawahlunto Tahun 2019	DinsosPMDPPA
15	Keputusan Walikota	235 Tahun 2019	penetapan pelaksana terbaik kegiatan kesatuan gerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keluarga berencana & kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2019	DinkesdaldukKB
16	Keputusan Walikota	241 Tahun 2019	penetapan tim operasional kegiatan kesatuan gerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2019	DinkesdaldukKB

17	Keputusan Walikota	300 Tahun 2019	perubahan ketiga atas keputusan walikota sawahlunto no 45 tahun 2019 tentang penetaoan satuan petugas registrasi administrasi kependudukan & pencatatan sipil di Lingkungan pemerintah kota sawahlunto Tahun 2019	disdalduk Capil
18	Keputusan Walikota	322 Tahun 2019	pembentukan pengurus Forum anak kota sawahlunto periode tahun 2019-2020	DinsosPMDPPA

Sumber : JDIH Kota Sawahlunto Tahun 2019

B. Bidang Sosial Budaya

Tabel 47. Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Barangin	8	6	14
2	Lembah Segar	2	2	4
3	Silungkang	1	1	2
4	Talawi	7	4	11
Kota Sawahlunto		18	13	31

Anak Terlantar sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012 merupakan Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Berdasarkan tabel di atas, jumlah anak terlantar terbanyak di kecamatan Barangin sebanyak 14 orang atau 45,16% dari total keseluruhan anak terlantar yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 48. Jumlah Anak yang ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Barangin	14	2	16
2	Lembah Segar	6	4	10
3	Silungkang	5	1	6
4	Talawi	1	-	1
	Kota Sawahlunto	26	7	33

Tabel 49. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Usia				Total
		0-6 th	7-12 th	13-15 th	16-20 th	
1	Barangin	1	7	5	14	27
2	Lembah Segar	-	7	4	8	19
3	Silungkang	1	-	-	2	3
4	Talawi	-	3	-	2	5
	Kota Sawahlunto	2	17	9	26	54

Penduduk berkebutuhan khusus (difabel) yang perlu mendapat pelayanan khusus di Kota Sawahlunto jumlahnya 54 orang yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Sawahlunto, tergolong penyandang difabel ringan dan berat. Bentuk atau jenis kekurangan yang dialami adalah menyangkut dengan penglihatan, pendengaran, cacat tubuh, gangguan konsentrasi, dan lain-lainya.

Dari jumlah difabel di atas, diantaranya adalah pada usia anak-anak. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berada pada usia pendidikan sangat penting mendapat perhatian dan pelayanan khusus jumlahnya 54 orang. Jumlah terbesar berada pada usia 16-20 tahun yaitu sebanyak 26 orang. Jumlah terbesar kedua berada pada usia 7-12 tahun yaitu sebanyak 17 orang. Sedangkan ABK usia 13-15 tahun sebanyak 9 orang dan usia 0-6 tahun sebanyak 2 orang. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di atas.

**Tabel 50. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga
Perasyarakatan Menurut Kecamatan di Kota
Sawahlunto Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Barangin	-	-	-
2	Lembah Segar	5	1	6
3	Silungkang	-	-	-
4	Talawi	-	-	-
Kota Sawahlunto		5	1	6

Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012 merupakan Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Berdasarkan tabel di atas, jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP) hanya terdapat di Kecamatan Lembah Segar, sebanyak 6 orang.

**Tabel 51. Jumlah Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan
di Kota Sawahlunto Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barangin	117
2	Lembah Segar	92
3	Silungkang	44
4	Talawi	86
Kota Sawahlunto		339

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012 merupakan seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan tabel di atas, jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi terbanyak di kecamatan Barangin, sebanyak 117 orang atau 34,51% dari total keseluruhan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 52. Jumlah Penduduk Lansia Terlantar Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Aktivitas yang dilakukan		
		Lain-lain (terlantar)		Jumlah
		L	P	
1	Barangin	93	149	242
2	Lembah Segar	55	95	150
3	Silungkang	32	73	105
4	Talawi	35	103	138
Kota Sawahlunto		215	420	635

Lansia Terlantar sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012 merupakan Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan tabel di atas, jumlah lansia terlantar terbanyak di kecamatan Barangin dengan jumlah 242 orang atau 38,11% dari total keseluruhan Jumlah Lansia Terlantar yang ada di Kota Sawahlunto

Tabel 53. Jumlah Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Barangin	1	-	1
2	Lembah Segar	-	1	1
3	Silungkang	1	-	1
4	Talawi	1	-	1
Kota Sawahlunto		3	1	4

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Dalam mengimplementasi PKH dibutuhkan tenaga-tenaga yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan PKH, yaitu Pendamping Sosial PKH. Pendamping Sosial PKH merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut oleh Kementerian Sosial sebagai pasukan garis terdepan dalam memberantas kemiskinan yang bekerja secara purna waktu dan bertanggung jawab dalam kegiatan pengembangan kepesertaan PKH di lapangan, seperti sosialisasi PKH, validasi, verifikasi, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), pemutakhiran, hingga proses penyaluran bantuan kepada KPM.

Jumlah Pendamping PKH Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sebanyak 4 orang, dengan jumlah pendamping laki-laki sebanyak 75% (3 orang) dan jumlah pendamping perempuan sebanyak 25 % (1 orang). Dengan lebih banyaknya jumlah pendamping laki-laki daripada perempuan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara signifikan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 54. Jumlah Putusan Cerai di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Talak	38
2	Cerai Gugat	106

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 terdapat 106 jumlah perceraian. Tingginya kasus perceraian menunjukkan bahwa banyak persoalan keluarga yang tidak bisa diselesaikan melalui jalan damai. Tindak lanjut dari banyaknya kasus perceraian akan melahirkan banyak persoalan sosial ekonomi lainnya yang harus ditanggung masyarakat, terutama kaum perempuan. Kondisi ini harus disikapi oleh pemangku kebijakan terkait untuk menekan angka perceraian di Kota Sawahlunto.

Tabel 55. Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Menurut Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Bina Kel Balita (BKB)	Bina Kel Remaja (BKR)	Posyandu
1	Barangin	31	2	31
2	Lembah Segar	29	8	29
3	Silungkang	19	5	19
4	Talawi	24	6	24
Kota Sawahlunto		103	21	103

Sumber: Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

C. Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 56. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Total
		Anak (0<18 Th)	Remaja (18-<25 Th)	25 Th ke atas	
1	Barangin	7	5	5	17
2	Lembah Segar	4		6	10
3	Silungkang	3			3
4	Talawi	5			5
Kota Sawahlunto		19	5	11	35

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perempuan korban kekerasan sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur yang luput dari pengawasan atau control orang tuanya/walinya/keluarganya. Pada umumnya anak korban kekerasan selalu dibujuk rayu dan diiming-imingi dengan recehan sehingga anak menjadi penurut dan tidak mampu untuk menolak atau melakukan perlawanan kepada pelaku.

Jumlah 57. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Total	
		Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat		DIII / S1 / S2
1	Barangin	1		2	2	3	2	10
2	Lembah Segar			1	1	3	1	6
3	Silungkang							0
4	Talawi							0
Kota		1	0	3	3	6	3	16

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, yang menjadi korban kekerasan pada umumnya perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga korban tidak mampu melakukan perlawanan karena kurangnya mendapat informasi tentang perlindungan Perempuan dan Anak. Korban tidak mempunyai wawasan tentang tata cara pengaduan korban kekerasan.

Tabel 58. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Status Pekerjaan						
		Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh / Karyawan / Pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di non Pertanian	Lain-lain
1	Barangin				1		1	8
2	Lembah Segar							6
3	Silungkang							
4	Talawi							
	Kota				1		1	14

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Bila dilihat dari status pekerjaan, perempuan yang mengalami korban kekerasan banyak anak sekolah dibandingkan dengan yang lainnya. Faktor penyebabnya adalah :

- a. Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa.
- b. Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa.
- c. Mudah diiming-imingi dengan diberikan pemberian/hadiah.
- d. Belum memahami tentang pendidikan seks.
- e. Pengawasan yang kurang dari seluruh elemen masyarakat

Tabel 59. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1	Barangin	4	5	1
2	Lembah Segar		5	1
3	Silungkang			
4	Talawi			
	Kota	4	10	2

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Dilihat dari status perkawinan, korban kekerasan yang belum kawin terdapat 4 orang, Sedangkan yang telah kawin terdapat 10 orang. Korban yang belum kawin, tergolong anak yang sangat mudah terpedaya dan belum mengerti tentang pendidikan seks.

Tabel 60. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan per Kecamatan di Kota sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Barangin	1	1	3		5	
2	Lembah Segar	3	1			2	
3	Silungkang						
4	Talawi						
Kota		4	2	3		7	

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya adalah penelantaran anak, hal ini disebabkan oleh :

- Media elektronik yang sangat berkembang pesat
- Kurangnya ilmu agama
- Faktor ekonomi
- Kurangnya pengetahuan tentang ketahanan keluarga

Tabel 61. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tempat Kejadian per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Barangin	10		
2	Lembah Segar	5		1
3	Silungkang			
4	Talawi			
Kota		15		1

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga dibanding tempat-tempat lainnya, apalagi pelaku umumnya adalah orang terdekat korban. Pelaku

sangat memahami situasi dan kondisi dalam rumah tangga tersebut dan lingkungannya tanpa terbaca dan tidak diketahui oleh orang lain.

Tabel 62. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan yang diberikan per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan dan Reintegrasi
1	Barangin	9			1	
2	Lembah Segar	5	1			
3	Silungkang					
4	Talawi					
	Kota	14	1		1	

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Tabel 63. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		Perguruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Barangin	1				1		2		5		1	
2	Lembah Segar	1								5			
3	Silungkang												
4	Talawi												
	Kota	2				1		2		10		1	

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Dari tabel di atas secara umum pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelaku dengan tingkat pendidikan yang rendah, pendidikan dan agamanya serta keimanan yang sangat kurang.

Tabel 64. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Pekerjaan per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Berusaha sendiri		Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar		Berusaha dibantu buruh tetap		Buruh / Karyawan / Pegawai		Pekerja bebas di pertanian		Pekerja bebas di non pertanian		Sekolah		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Barangin							2				5		1		2	
2	Lembah Segar											4				2	
3	Silungkang																
4	Talawi																
Kota								2				9		1		4	

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Tabel 65. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Hubungan dengan Korban per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban										
		Orangtua		Kerabat		Suami	Teman		Tetangga		Orang Lain	
		L	P	L	P		L	P	L	P	L	P
1	Barangin	1				6	1		1		1	
2	Lembah Segar					5			1			
3	Silungkang											
4	Talawi											
Kota		1				11	1		2		1	

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang yang dikenal dan terdekat dengan korban karena orang-orang ini sangat memahami tentang sifat, tingkah laku dan kebiasaan korban dan merasa korban tidak akan mengadu atau melaporkan perbuatan pelaku.

Tabel 66. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kebangsaan per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1	Barangin	10			
2	Lembah Segar	6			
3	Silungkang				
4	Talawi				
Kota		16			

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Tabel 67. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan											
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplorasi		Penelantaran		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Barangin		1				1			1	3	1	
2	Lembah Segar	1	1			1	1						
3	Silungkang						3			1	1		
4	Talawi	1					2						
Kota		2	2			1	7			2	4	1	

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Anak merupakan sasaran korban kekerasan, baik psikis maupun seksual dan penelantaran.

Walaupun kasus yang terbanyak adalah kekerasan seksual, hal ini disebabkan oleh :

- a. Anak merasa takut dengan orang dewasa,
- b. Anak memiliki rasa kepercayaan yang tinggi dengan orang dewasa,
- c. Anak akan meniru perbuatan orang dewasa,
- d. Anak mudah dibujuk rayu,
- e. Pengawasan yang kurang dari orang tua dan masyarakat

Tabel 68. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut Tempat Kejadian per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Tempat Kejadian			
		Rumah	Lingkungan	Sekolah	Lainnya
1	Barangin	6		1	
2	Lembah Segar	2		1	1
3	Silungkang	3			
4	Talawi	4		1	
	Kota	15		3	1

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya melakukan kekerasan dirumah atau tempat tinggal korban, karena lokasi ini merupakan tempat yang aman bagi pelaku untuk menjalankan aksinya dan tidak mudah diketahui oleh massa.

Tabel 69. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Pelayanan yang diberikan per Kecamatan di Kota Sawahlunto tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan									
		Penanganan Pengaduan		Pelayanan Kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Penegakan dan Bantuan Hukum		Pemulangan dan Reintegrasi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Barangin	2	4		1						
2	Lembah Segar	2	2								
3	Silungkang		3								
4	Talawi	2	2						1		
	Kota	6	11		1				1		

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

Tabel 70. Jumlah anak Korban Kekerasan menurut Hubungan dengan Pelaku per Kecamatan di Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Kecamatan	Hubungan Pelaku									
		Orangtua		Keluarga		Tetangga		Petugas di sekolah		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Barangin	3	1							2	1
2	Lembah Segar		1			1				2	
3	Silungkang					2				1	
4	Talawi	2								2	1
	Kota	5	2			3				7	2

Sumber: P2TP2A Kota Arang Tahun 2019

8 PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dibidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di Kota Sawahlunto, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat di dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 4 orang (10 %) perempuan yang duduk di lembaga legislatif dibanding laki-laki 16 orang (80 %).

Jumlah partai politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kota Sawahlunto pada periode 2019-2024 adalah 10 partai yaitu partai PKPI, PPP, GOLKAR, DEMOKRAT, PAN, PKS, PDI.P, NASDEM, PERINDO, GERINDRA. Keterwakilan perempuan hanya 4 orang pada partai PKPI, PPP, dan GOLKAR.

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kondisi ini terkait dengan dominasi budaya patriarki yang masih kuat mempengaruhi dunia politik, termasuk iklim partai politik yang berbau maskulin. Aturan hukum perlu dicantumkan dalam UU Pemilu mendatang untuk menyadarkan bahwa ada hak perempuan yang selama ini terabaikan yang harus dikembalikan. Dengan lebih banyak keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, akan mempengaruhi kebijakan yang lebih pro terhadap kebutuhan perempuan.

Selanjutnya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif.

Pertama, berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Kedua, berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di

beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.

Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan organisasi-organisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999.

Selain persoalan di atas, masalah-masalah berikut bisa ditambahkan:

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita:

Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan.

Faktor-faktor keluarga:

Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka di luar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

Sistem multi-partai :

Besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu di antara laki-laki, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan.

Tabel 71. Jumlah Anggota DPRD Kota Sawahlunto menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Partai	Komposisi anggota DPRD Kota Sawahlunto		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PKPI	2	1	3
2	PPP	1	2	3
3	GOLKAR	1	1	2
4	DEMOKRAT	2	-	2
5	PAN	2	-	2
6	PKS	2	-	2
7	PDI.P	2	-	2
8	NASDEM	2	-	2
9	PERINDO	1	-	1
10	GERINDRA	1	-	1
Jumlah		16	4	20

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 72. Jumlah Anggota DPRD Kota Sawahlunto menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Komisi	Komposisi anggota DPRD Kota Sawahlunto		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Komisi I	5	1	6
2	Komisi II	4	1	5
3	Komisi III	6	-	6
Jumlah		15	2	17

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Sawahlunto Tahun 2019

Tabel 73. Jumlah Anggota DPRD Kota Sawahlunto menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Fraksi	Komposisi anggota DPRD Kota Sawahlunto		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP, DEMOKRAT, PERINDO)	4	2	6
2	PAN, GOLKAR, PDI.P	5	1	6
3	PKPI	2	1	3
4	GERAKAN RESTORASI Keadilan Indonesia Raya	5	-	5
Jumlah		16	4	20

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Sawahlunto Tahun 2019

B. Peranan dan Komposisi di Lembaga Yudikatif

Tabel 74. Jumlah Hakim menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah Hakim		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketua IV/a (Tk.I)	1	-	1
2	Hakim IV/a (Tk.I)	-	1	1
Jumlah		1	1	2

Sumber : Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto Tahun 2019

C. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 75. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Umum	275	259	534
2	Fungsional Tertentu	224	935	1.159
3	Eselon II	18	2	20
4	Eselon III	67	30	97
5	eselon IV	138	163	301
Jumlah		722	1.389	2.111

Sumber : BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kota Sawahlunto adalah sebanyak 2.111 orang, yang sebagian besar adalah perempuan sebanyak 65,79% (1.389 orang) dan laki-laki sebanyak 34,20% (722 orang).

2. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Tabel 76. Jumlah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019

No	Jabatan	Tim Beperjakat Kota Sawahlunto		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten Hukum, Pemeritahan dan Politik	1	-	1
3	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	0

4	Asisten Administrasi Umum	1	-	1
5	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	1
6	Inspektur	1	-	1
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	-	1
Jumlah		6	0	6

Sumber : BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2019

3. Camat

Tabel 77. Camat menurut jenis kelamin Per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Barangin	1	-
2	Lembah Segar	1	-
3	Silungkang	1	-
4	Talawi	1	-
Kota Sawahlunto		4	-

Sumber : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto Tahun 2019

D. Dasar Hukum dan Arah Kebijakan Pemberdayaan di Kota Sawahlunto

Isu Gender menyangkut masalah ketidakadilan yang menimpa baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam banyak kasus ketidakadilan itu banyak menimpa perempuan, yang dialaminya baik di rumah, tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Unsur penting yang menyebabkan timbulnya isu gender adalah hubungan gender yang timpang dan konsekwensinya terhadap seseorang dalam memperoleh akses, manfaat, keikutsertaan dalam memutuskan serta penguasaan terhadap sumber-sumber daya. Adapun yang disebut bentuk-bentuk ketidak-adilan gender, antara lain:

1. Subordinasi, yaitu Posisi /peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain;
2. Marjinalisasi, yaitu Peminggiran peran ekonomi;
3. Beban Ganda, yaitu Beban kerja yang dibebankan;
4. Kekerasan, yaitu kekerasan yang dialami baik secara fisik maupun non fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang (trafiking);
5. Pelabelan (Stereotipe), yaitu pemberian label yang menimbulkan anggapan yang salah.

Beberapa prinsip pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan dalam dalam pembangunan, yaitu:

1. PUG adalah strategi untuk lebih fokus dan efektif; bukan menggantikan program atau kebijakan yang spesifik dibutuhkan oleh perempuan dan oleh laki-laki;
2. Membutuhkan reorientasi dalam banyak hal (paradigma pembangunan: kerjasama sektor; pendanaan; indikator; sistem pendataan, dst);
3. Tidak berasumsi bahwa semua perencanaan pembangunan, kebijakan, dst itu netral sifatnya, atau tidak ada maksud diskriminatif;
4. PUG harus melembaga melalui langkah-langkah kongkrit;
5. Hasil PUG harus akuntable dan dimonitor secara berkelanjutan;
6. Dukungan politik; dukungan pimpinan; dukungan sumberdaya, dukungan media.

Demikian pula penyusunan Data Terpilah Statistik Gender dan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berperspektif gender, dan fakta terkait kondisi anak di Kota Sawahlunto.

